

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Sehingga jumlah penduduk yang banyak itulah yang seharusnya diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang tinggi pula, namun pada kenyataannya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah peluang kesempatan kerja. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan tersebut adalah jumlah pengangguran yang tinggi.

Menurut Nanga, pengangguran (*employment*) adalah kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.<sup>1</sup>

Menurut Sukirno, dampak dari pengangguran ada dua aspek yaitu akibat atas kegiatan perekonomian dan akibat atas individu dan masyarakat. Akibat yang pertama terhadap kegiatan perekonomian yaitu berpengaruh pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Dan akibat yang kedua terhadap individu

---

<sup>1</sup> Nanga Muana, *Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 253.

dan masyarakat yaitu menyebabkan kehilangan mata pencaharian, menghilangkan ketrampilan dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus pemecahannya adalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya sudah ada upaya yang selama ini telah banyak dirancang oleh berbagai pihak untuk mengatasi masalah tentang kemiskinan tersebut. Mulai digalakkan oleh berbagai sektor, contohnya dari sektor pemerintah dengan program-program unggulannya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat melalui usaha yang dilakukan, yang mana bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Menurut Widayanti, pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat terutama masalah kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil.<sup>3</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya.

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dari berbagai aspek contohnya dengan pembangunan desa. Pembangunan desa adalah pembangunan yang

---

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi. Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32.

<sup>3</sup> S. Widayanti, "Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis", *Jurnal Welfare*, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 87-102.

dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat. Dimana pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan bagi masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.<sup>4</sup>

Pembangunan desa dalam UU Desa BAB IX tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Pasal 78 Ayat 1 “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.<sup>5</sup>

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun/menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban tugas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Menurut Solekhan, pada hakikatnya bahwa keberadaan pemerintah dan birokrasi adalah dalam rangka menjalankan tugas dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal. 222.

<sup>5</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>6</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2014), hal. 13.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pedesaan harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan kawasan pedesaan harus secara merata dan tidak hanya berfokus pada salah satu sektor saja, agar dalam hal pendistribusian bantuan dapat berjalan secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat menerima bantuan tersebut dengan tepat sasaran agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan. Dan dalam hal pembangunan juga perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup pembangunan desa secara lebih luas.

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), Gapoktan dan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Adapun persamaannya yaitu dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping.

Dalam pelaksanaannya, beberapa program tersebut masih memiliki banyak permasalahan dan untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya koordinasi dengan mensinergikan program PUAP, Gapoktan, dan Demapan. Beberapa aspek diantaranya adalah diawali dengan pemilihan desa penerima program, penataan internal kelembagaan program, pemantapan pengembangan infrastruktur dan

antisipasi implementasi dari ketiga program tersebut. Diharapkan akselerasi pembangunan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.<sup>7</sup>

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian dalam mengatasi masalah yang dihadapi melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.

Untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kawasan pangan, maka sejak tahun 2015 telah dikembangkan Kawasan Mandiri Pangan di 78 kawasan, 77 Kabupaten/Kota, pada 23 Provinsi. Kawasan Mandiri Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa terpilih, untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah rentan terhadap rawan pangan menjadi masyarakat mandiri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Eko Santoso dan Umi Erniasih, "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP, Gapoktan dan Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus di Beberapa Desa di Kabupaten Grobogan)", *UNNES: Forum Ilmu Sosial*, Vol. 43, No. 2, 2016, hal. 144.

<sup>8</sup> Badan Ketahanan Pangan, *Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan*, (Jakarta : Menteri Pertanian Republik Indonesia Kepala Badan Ketahanan Pangan, 2017), hal. 3.

Tabel 1.1

Data Lokasi Penerima Program Desa Mandiri Pangan<sup>9</sup>

No.	Lokasi Kecamatan Desa	Nama kelompok	Sumber Dana Tahun Perolehan Dan Dana Awal	Bentuk Usaha
1	2	3	4 : (per kelompok)	5
1	Campurdarat, Wates	1. Sri Rejeki	APBN 2012 Rp. 25.000.000	Ternak Kambing
		2. Ngudi Pangan		Ternak Kambing
		3. Ngudi Luhur		Ternak Kambing
		4. Podo Rukun		Ternak Kambing
2	Sumbergempol, Sambirobyong	1. Sekar Arum	APBN 2011 Rp. 25.000.000	Perajin Kaset Krupuk Gambir
		2. Anggrek		Perajin Kaset Kerupuk Gambir
		3. Wijaya Kusuma		Saprodi
		4. Dahlia		Perikanan
		5. Mawar Putih		Perajin Kaset
		6. Sekar Kusuma (LKD)		Perajin : - Kaset - Bak Ayam - Krupuk Gambir - Perajin Pangan Olahan Lainnya
3	Tanggunggunung, Tanggunggunung	1. Margo Mukti	APBN 2010 Rp. 25.000.000	Simpan Pinjam Saprodi Benih Jagung Pupuk
		2. Lumintu		Saprodi Benih Jagung Pupuk Herbisida
		3. Usaha Baru		Saprodi Benih Jagung Pupuk
		4. Klampok Jaya		Saprodi Benih Jagung Pupuk

<sup>9</sup> Dokumen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.

4	Sendang, Geger	1. Manunggal Tekad	APBN 2010 Rp. 25.000.000	Ternak Simpan Pinjam
		2. Harapan Jaya		Ternak Simpan Pinjam
		3. Guyub Rukun		Ternak Sapi Perah
		4. Mandiri		Ternak
5	Wates, Sumbergempol	Sekar Harapan Makmur	APBN II 2017 Rp. 100.000.000 Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Cadangan Pangan	Bibit/Benih Sayuran Ikan Ternak Kolam Green House

Melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung sebagai perantara dalam mengembangkan program Desa Mandiri Pangan. Di Tulungagung sendiri terdapat 5 desa yang mendapatkan bantuan program tersebut namun dari beberapa desa tersebut yang memberikan hasil yang cukup memuaskan adalah di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol. Dimana bantuan program yang diterima oleh masyarakat berupa simpan pinjam.

Sedangkan untuk pemanfaatan dana bantuan tersebut disesuaikan dengan bentuk usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Ada yang digunakan untuk membeli alat baru, digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, atau digunakan untuk membuka usaha baru. Sebagai contoh dulu yang hanya menjahit pesanan sekarang setelah menerima bantuan modal digunakan untuk membeli mesin jahit baru dan sekarang selain menerima pesanan tapi juga sudah dapat membuka toko baju untuk menjual hasil jahitannya. Jadi manfaat yang dirasakan setelah adanya bantuan program tersebut yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Walaupun sudah berkembang dengan baik namun masih ada saja kendala dalam mengembangkannya seperti minat masyarakat yang masih kurang sehingga untuk mengatasinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung sebagai pembina sering melakukan acara pembinaan dan sosialisasi agar menambah wawasan masyarakat dan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap program pemerintah tersebut agar kedepannya program tersebut dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat yaitu dengan program Desa Mandiri Pangan (Demapan). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala sehingga perlu diadakan pembinaan, pengawasan serta sosialisasi agar dalam perkembangannya dapat berjalan dengan baik dan dapat memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Peranan Program Desa Mandiri Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Pangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan?



2. Bagaimana Dampak Adanya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Pangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan ?
3. Bagaimana Kendala Dan Solusi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Pangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian masalah tersebut, bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Pangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.
2. Mendiskripsikan Dampak Adanya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Pangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.
3. Mendiskripsikan Kendala Dan Solusi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Pangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.

### **D. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini dilakukan di desa Sambirobyong mengenai bagaimana progres dari program Desa Mandiri Pangan. Di sana terdapat 6 (enam) kelompok yang masing masing memiliki bentuk usaha yang bermacam-macam. Dari sana akan dilihat peranan dari adanya program Demapan, dampak adanya program

Demapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta kendala dan solusi perkembangan program Demapan tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut, maka di harapkan hasil penelitian tersebut dapat memperoleh kegunaan sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah segi keilmuan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengembangan program tersebut serta peran pemerintah dalam mendukung kegiatan tersebut. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan menambah informasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran mengenai perkembangan program Desa Mandiri Pangan di Desa Sambirobyong dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

###### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah referensi bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.

###### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti ataupun pembaca.

## **F. Definisi Istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat ini menyangkut antara dua kelompok yang saling terkait antara satu dengan yang lain, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak lain yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.<sup>10</sup>

#### b. Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa atau kampung terpilih (terdiri dari satu desa/kampung), untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan menjadi kaum mandiri.<sup>11</sup>

#### c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil pembangunan masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan,

---

<sup>10</sup> Gunawan Sumodinigrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 56.

<sup>11</sup> Badan Ketahanan Pangan, *Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan...*, hal. 03.

perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang dalam lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga; memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional dari judul “Peranan Program Desa Mandiri Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian tentang bagaimana peranan program Desa Mandiri Pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang didalamnya berisi tentang bagaimana strategi yang digunakan untuk mengembangkan program tersebut, kemudian dampak yang ditimbulkan setelah adanya program tersebut dan yang terakhir adalah kendala dan solusi yang dihadapi dalam mengembangkan program tersebut.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang keseluruhan dari isi penelitian ini, yang terdiri atas bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar

---

<sup>12</sup> Joseph E Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Mengukur Kesejahteraan*, (Tangerang Selatan : Marjin Kiri, 2011), hal. 10.

lampiran, dan abstrak. Sedangkan bagian isi, penelitian terdiri atas enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang uraian mengenai (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) definisi istilah, (g) sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis atau paradigmatis.

BAB III Metode penelitian, terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, terdiri dari (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI Penutup, terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.